



Pemkot Yogyakarta Menyosialisasikan Pentingnya Komunikasi di Lingkup Keluarga

Lepaskan Gawai Kembali ke Meja Makan



TRIBUN JOGJA/KURNIATUL HIDAYAH

LOKAKARYA - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, saat memberikan penjelasan dalam lokakarya Kembali ke Meja Makan, Kamis (22/8).

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengundang seluruh camat, lurah, dan LPMK untuk hadir dalam sosialisasi "Kembali ke Meja Makan, 18-21 No Gawal" yang digelar di Ruang Bima Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (22/8).

Penjabat Sekda Kota Yogyakarta, Heri Karyawan, menjelaskan bahwa Kembali ke Meja Makan merupakan gerakan moral untuk mengetuk semua orang, bahwa keluarga adalah modal utama membangun ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang berkualitas.

"Gerakan Kembali ke Meja Makan 18-21 tanpa gawai bukan gerakan baru. Ini merupakan cara sederhana mengumpulkan dan mengingatkan anak, orang tua, dan seluruh penghuni rumah untuk puasa menggunakan gadget dari pukul 18.00-21.00. Ada waktu 3 jam yang krusial," urainya, saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan bahwa cita-cita untuk membangun keluarga berkualitas bukan hal yang mudah. Terlebih dunia pergawitan berkembang sangat pesat. "Tapi yakin dengan dukungan semua pihak, ini dapat terwujud. Kami berharap kehadiran semua dapat memotivasi semangat untuk memperbaiki kualitas hidup masing-masing untuk memupuk kebersamaan agar menjadi tangguh menghadapi permasalahan," urai Heri.

Ia pun mengatakan bahwa meja makan menjadi tempat komunikasi yang baik bagi keluarga. Terlebih tanpa dihalangi keberadaan gawai yang membatasi komunikasi tatap muka. "Kita bangun peran keluarga mulai dari meja makan," serunya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, menjelaskan bahwa banyak anak di Kota Yogyakarta yang dalam kondisi

● ke halaman 15

Tindak Lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/>	Jumpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.

Lepaskan Gawai

● Sambungan Hal 9

miris. Hal ini salah satunya merupakan dampak Kota Yogyakarta yang merupakan kota pariwisata.

"Kita kota besar yang pariwisata nomor 1 untuk domestik dan Bali nomor 4. Lingkungan yang membentuk anak-anak lebih modern. Dampaknya pariwisata, tengoklah anak-anak kita," ujarnya.

Pariwisata bukan menjadi hal yang berdampak buruk bagi Kota Yogyakarta. Ana, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dampak positif

dari sektor pariwisata juga banyak. Salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga perekonomian masyarakat. Namun memang tidak dapat dimungkiri bahwa sektor pariwisata juga menimbulkan dampak negatif.

"Selain pariwisata, Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan. Banyak pendatang yang kosnya tidak berinduk semang, tidak ada orang tua, dan semua asrama senusantara punya asrama di Yogyakarta," bebernya.

Sapa indekos

PKK Kota Yogyakarta,

lanjutnya, sudah mengge-
rakan semua indekos untuk memiliki induk semang. Ada ribuan indekos yang tersebar di kota dan PKK memiliki program 24 kali kunjungan dalam setahun. "Program sapa anak kos sebetulnya sidak, juga ada lomba kos-kosan. Sapa anak kos saat kita datang, ini kami lihat bagaimana," ungkapnya.

PKK melalui pendekatan keibuan, mencoba berbincang dengan penghuni indekos dan mendapatkan banyak cerita beragam. Salah satunya adalah mengenai perilaku seks bebas.

"Angka kehamilan anak

usia 9-18 tahun lebih dari 262 kasus. Ada anak 10 tahun begitu mens pertama kali langsung hamil. Saya tanya ternyata pada usia 7-8 tahun sudah kegiatan seks. Dia main *game online*, lalu ada iklan soal seks. Dia sama sekali enggak tahu. Dipikirmya seks sama seperti *game*. Tidak tahu dampaknya," ujarnya.

Ana menjelaskan bahwa seks itu sama dengan narkoba. Banyak yang mencoba dan merasakan kecanduan. "Perlu kita pikirkan bagaimana agar mereka tidak hancur masa depannya," pungkasnya. **(Kurniatul Hidayah)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005